

KAUM DAN NAGARI: EKSISTENSI KAUM DALAM PEMBANGUNAN DI NAGARI PASIA LAWEH KECAMATAN PALUPUAH KABUPATEN AGAM

Ibnu Chalid Bestari^{1(a)}, Roni Ekha Putera^{2(b)}, Desna Aromatica³

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Andalas

^{2,3}Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas

^{a)}chalidbest@adm.unand.ac.id, ^{b)}roniekhaputera@soc.unand.ac.id,

^{c)}desnaaromatica@soc.unand.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

30-11-2023

Diterbitkan Online:

01-03-2024

Kata Kunci:

Eksistensi, Kaum, Pembangunan, Nagari

Keywords:

Existence, Kaum, Development, Nagari

Corresponding Author:

roniekhaputera@soc.unand.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i1.909>

ABSTRAK

Kaum merupakan salah satu dari tiga bentuk kelompok kekerabatan dalam masyarakat minangkabau. Kaum berupa kumpulan dari beberapa paruik, dan suku adalah kumpulan dari beberapa kaum dan nagari terdiri dari paling kurang empat suku. Eksistensi paruik, kaum dan suku dalam kehidupan masyarakat nagari masih sangat dirasakan sampai saat ini. Eksistensi kaum ini juga masih sangat dirasakan di Nagari Pasia Laweh, termasuk dalam kegiatan pembangunan. Penelitian ini akan melihat lebih lanjut terkait eksistensi kaum dalam pembangunan di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Nagari Pasia Laweh masih hidup berkelompok-kelompok dengan sebutan kaum. kaum merupakan unsur paling penting dalam pembangunan di Nagari Pasia Laweh, dan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan oleh kaum. Motto sahino samalu membuat semua kaum mau terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan, dalam rangka memajukan nagari dan memenuhi kebutuhan kaum.

ABSTRACT

Kaum is one of three forms of kinship groups in Minangkabau society. Kaum is a collection of several paruik, and suku is a collection of several kaum and nagari consists of at least four suku. The existence of paruik, kaum and suku in the lives of nagari people is still felt to this day. The existence of this group is still felt in Nagari Pasia Laweh, including in development activities. This research will look further at the existence of groups in development in Nagari Pasia Laweh, Palupuah District, Agam Regency. The research method used is qualitative with descriptive analysis. Data collection techniques use interviews and documentation. The results of the research show that the people of Nagari Pasia Laweh still live in groups called tribes. People are the most important element in development in Nagari Pasia Laweh, and every stage of development is carried out by people. sahino samalu motto makes all people want to be actively involved in development activities, in order to advance the nagari and meet the needs of the people.

PENDAHULUAN

Konsep governance yang meletakkan posisi yang seimbang antara pemerintah, dunia usaha dan civil society menjadi konsep penting yang mengubah paradigma mengenai peran masyarakat dalam Pembangunan (Osborne, 2006). Dalam konteks ini masyarakat bukan lagi sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai posisi yang penting dalam proses pembangunan. Perubahan paradigma ini lahir sejalan dengan hadirnya konsep pembangunan partisipatif (*participatory development*) yang menjadi bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan kemudian dikembangkan lagi menjadi konsep pembangunan berbasis komunitas (*community based development*). Studi tentang governance kaitannya dengan pembangunan kawasan pedesaan sudah dimulai di era 1990-an yaitu mengkaji tentang pelibatan masyarakat sebagai komunitas dalam perumusan kebijakan public di Irlandia Utara (Murray & Greer, 1999).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dimana salah satu perubahan mendasar adalah adanya pengakuan (reognisi) terhadap fungsi desa sebagai *self-governing community* sejalan dengan *local self government*. Artinya, eksistensi desa tidak hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan tingkat atas, melainkan juga diakui sebagai komunitas yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya (otonomi) sendiri sesuai dengan nilai-nilai lokal. Seiring dengan perkembangan kondisi social masyarakat di pedesaan, tentu harapan ini tidaklah mudah diwujudkan, meskipun kebijakan telah memberikan peluang seluas-luasnya.

Dalam konteks pemerintahan, nagari merupakan unit pemeritahan terendah, setara dengan desa. Hanya saja, penyebutan dan sistem pemerintahan nagari sedikit berbeda dengan desa. Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari. Pemerintah Nagari dipimpin oleh Wali Nagari, yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Wali Nagari. Pelaksanaan pemerintahan nagari hampir sama dengan pemerintahan desa, hanya nomeklatur yang berbeda. Namun, saat ini pemerintah provinsi sedang mengusahakan agar pemerintah nagari

di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.

Nagari merupakan Susunan masyarakat di Minangkabau bersifat genealogis-teritorial yang dinamakan Nagari. Dalam tiap-tiap nagari tersebut terdapat beberapa suku, dan satu suku terdapat beberapa kaum (Bagus Brata, 2016). Cara berfikir kaum di Minangkabau bersifat komunal, dimana menekankan pada kebersamaan dalam ikatan yang kuat, senasib sepenenderitaan, secita-cita dan sepersetujuan yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat.

Cara berfikir masyarakat di Nagari sudah menjadi nilai-nilai yang khas dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi *cultural identity* masyarakat yang hidup di nagari, yang telah menjadi kearifan lokal masyarakat. Secara konseptual, kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Subadio mengatakan kearifan lokal secara keseluruhan dianggap sebagai identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa (Bagus Brata, 2016).

Kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi di Nagari merupakan bentuk kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Nagari untuk menggali potensi masyarakat. Kearifan lokal di Nagari juga dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Salah satu bentuk pemanfaatan kearifan lokal dalam pembangunan adalah pelibatan kaum. Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam memanfaatkan kaum dalam pembangunan di nagari. Di Nagari Pasia Laweh terdapat 122 niniak mamak, yang disebut dengan niniak mamak nan saratuiah dikato. Nagari Pasia Laweh juga memiliki tujuh suku, dan empat tapatan adat, dengan istilah mambasuik dari bumi. Visi Nagari Pasia Laweh, yaitu “mewujudkan nagari maju berbasis keunggulan lokal” membuat Nagari Pasia Laweh memanfaatkan potensi kaum sebagai keunggulan lokal nagari, termasuk pembangunan. Kegiatan pembangunan yang dilakukan di Nagari Pasia Laweh selalu melibatkan kaum. Artikel ini akan membahas lebih lanjut eksistensi kaum dalam pembangunan di Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam.

Secara konseptual, kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Kearifan lokal merupakan tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan, keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan bersama yang

diwarisi secara turun temurun. Kearifan sosial merupakan bentuk modal sosial yang dikembangkan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan (Addiarrahman, 2019; Nugraha, 2020; Samiyono, 2018).

Banyak ahli yang telah mendefinisikan terkait kearifan lokal. Quarich Wales mengemukakan: “*..the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experiences in early life*” (keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau)(Astra, 2004). Sedangkan menurut Mudardjito, kearifan lokal terbina secara kumulatif, terbentuk secara evolusioner, bersifat tidak abadi, dapat menyusut dan tidak selamanya tampak jelas secara lahiriah(Bagus Brata, 2016). Pandangan ini mempertegas bahwa kearifan lokal dapat memudar dan menghilang jika tidak dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal sarat dengan makna kebersamaan dan mempunyai fungsi sosial yang tinggi. Namun, nilai-nilai ini bisa saja memudar jika pengaruh globalisasi yang lebih kuat masuk ke dalam masyarakat. Namun, Poespowardojo menegaskan bahwa sifat-sifat hakiki kearifan lokal adalah 1) mampu bertahan terhadap budaya luar, 2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam kebudayaan asli, 4) mampu mengendalikan, 5) mampu memberikan arah pada perkembangan budaya(Astra, 2004). Atas itu kearifan lokal dapat dimaknai sebagai kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional mengelola potensi yang ada di masyarakat.

Secara umum, kearifan lokal bisa memudar, bahkan menghilang. Hal ini bisa saja disebabkan oleh perubahan sikap masyarakat yang cenderung lebih individual, menganggap nilai-nilai yang ada di masyarakat sudah kuno, dan perlu diperbarui. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh indikator kemampuan bertahan kearifan lokal, yaitu 1) ketahanan ideal (ketahanan sistem nilai), 2) ketahanan struktural (ketahanan kelembagaan), 3) ketahanan pisikal (ketahanan sistem budaya fisik), 4) ketahanan mental (ketahanan sikap mental), 5) ketahanan fungsional (ketahanan fungsi unsur-unsur

kebudayaan), 6) ketahanan sistemik (ketahanan totalitas sistem masyarakat), 7) ketahanan prosesual (ketahanan dan kelenturan menghadapi perubahan) (Addiarrahman, 2019; Astra, 2004; Bagus Brata, 2016; Nugraha, 2020; Samiyono, 2018).

Pada dasarnya, pembangunan merupakan perubahan ke arah yang lebih baik. Inayatullah mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan memungkinkan warganya memperoleh kontrol terhadap diri mereka sendiri (Suryono, 2001).

Selanjutnya Todaro mendefinisikan pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan manusia (Syamsurizaldi et al., 2020). Dharmawan mengungkapkan pembangunan sebagai sebuah pergeseran yang berjalan secara gradual dan tidak berulang yang didalamnya diisi oleh usaha-usaha atau realisasi atas rencana-rencana yang dibuat secara rinci dan mencakup tema-tema penting kehidupan sebagai pokok perubahan dan pertumbuhan atau perbaikan (Putri, 2019).

Adapun tujuan dari pembangunan (Adisasmita, 2006) adalah:

- a. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan;
- b. Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh masyarakat setempat, dunia usaha, dan masyarakat umum;
- c. Terlaksananya sejumlah investigasi dalam berbagai faktor;
- d. Terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan investasi swasta.

Pembangunan di nagari tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Masyarakat merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam pembangunan. Masyarakat sebagai subjek maupun objek pembangunan. Dalam hal ini, pembangunan dimaksudkan berasal dari masyarakat, dan berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat nagari yang terdiri dari kaum, tentunya memiliki peranan penting dalam pembangunan di nagari. Menurut Adi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari empat, tahap (Adisasmita, 2006), yaitu:

1. Tahap assesment, yaitu mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat terlibat aktif dalam melihat permasalahan yang terjadi, kemudian mengidentifikasi kebutuhan.
2. Tahap alternatif program atau kegiatan, yaitu tahap masyarakat mengajukan usul alternatif program sesuai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya.
3. Tahap pelaksanaan program, dimana program yang telah direncanakan sebelumnya direalisasikan dengan baik di lapangan.
4. Tahap evaluasi, tahap dimana masyarakat menilai kesuksesan program pembangunan yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati (Moleong, 2010). Tipe penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyusun data, kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya. Pendekatan dan tipe ini digunakan karena peneliti ingin menjelaskan dan mendeskripsikan kepemimpinan kolaboratif Wali Nagari Rancak Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengambilan data primer menggunakan wawancara, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, berita, dan dokumen resmi lainnya. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, kemudian analisis dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan nagari ini merupakan nagari percontohan penanggulangan Covid-19 berbasis kaum di Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nagari Pasia Laweh telah banyak melakukan pembenahan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Nagari ini memiliki 10 potensi pembangunan, yaitu hutan, sawah, sungai, adat istiadat, swadaya (manunggal), pemberdayaan perempuan, perantau, wisata, religius, dansejarah. Potensi pembangunan tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang telah dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Hutan seluas 7000 Ha., yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan ulayat. Dari 7000 Ha, dalam tiga tahun 4025 Ha. Telah dikelola oleh masyarakat nagari, dibawah LPHN Nagari. Hutan yang dikelola tersebut adalah hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Nagari Pasia Laweh memiliki 65 kelompok tani hutan (KTH) yang berada di bawah LPHN. Kelompo tani hutan tersebut dijalankan berbasis kaum. Kemampuan nagari mengelola hutan mengantarkan Nagari Pasia Laweh menjadi terbaik 2 dalam pengelolaan hutan di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Pembangunan wisata. Saat ini Nagari Pasia Laweh sedang melakukan pembangunan wisata pintu angin angede, air terjun tiga tingkat, ikan banyak, dan beberapa objek wisata lainnya.
- 3) Pembangunan nagari pola manunggal, dimana setiap pembangunan di Nagari Pasia Laweh melibatkan masyarakat, baik dalam bentuk materi dan immateri.

Selain pembangunan tersebut, juga terdapat inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah Nagari Pasia Laweh bersama-sama dengan masyarakat, yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Inovasi Pembangunan Nagari Pasia Laweh

No	Inovasi
1	Kelompok tani hutan berbasis kaum
2	Gerakan nagari menabung
3	Pendidikan berbasis surau
4	Sarjana pendamping inovasi nagari (SPIN)
5	Apel gabungan aparaturnya sekolah
6	Pos data dan informasi nagari
7	Silat tradisional masuk sekolah
8	Kelompok siaga bencana berbasis kaum
9	Satu jorong satu wisata unggulan
10	Buletin nagari
11	Wirid aparaturnya

No	Inovasi
12	Advokasi nagari
13	Aparatur mengajar
14	Penomoran rumah terintegrasi
15	BUMNag berkolaborasi dengan posyantek nagari
16	Sistem pemagangan perangkat nagari
17	Sekolah hukum adat nagari (SAHAM)
18	Aparatur sarjana
19	Pelayanan cepat, tepat, cermat, plus
20	Festival samba maco ilmiah
21	Festival lagu kebangsaan dasawisma
22	Anugerah bhakti nagari
23	Festival budaya nagari
24	Salam sumando sumandan nagari
25	Pameran produk inovasi nagari
26	Kompetensi aparatur nagari
27	Nagari ilmiah
28	Rumah lestari
29	Pasar rakyat gratis

Sumber: Pemerintah Nagari Pasia Laweh, diolah. 2020

Dari tabel 1. Terlihat banyak inovasi pembangunan yang telah dilakukan di Nagari Pasia Laweh. Semua kegiatan tersebut dilakukan bukan hanya oleh Pemerintah Nagari, tapi juga melibatkan kaum.

Eksistensi Kaum dalam Pembangunan di Nagari Pasia Laweh

Nagari Pasia Laweh terdiri dari tujuh jorong, dan juga memiliki tujuh suku. Dari tujuh suku, terdapat 122 niniak mamak yang disebut dengan niniak mamak nan saratuih dikato, dan 4 tapatan adat dengan istilan mambasuik dari bumi. Artinya, semua keputusan yang diambil berasal dari anggota, tidak hanya titah dari niniak mamak. Tapatan adat tersebut terdiri dari tapatan niniak mamak nan 27 dikato, tapatan niniak mamak nan 12 dikato, tapatan niniak mamak nan 36 dikato, tapatan niniak mamak nan 18 dikato.

Dari 122 niniak mamak nagari, 82 niniak mamak sudah baralek. Niniak mamak yang sudah baralek tersebut kemudian fotonya dipajang di kantor wali nagari, dengan maksud bahwa Nagari Pasia Laweh dijalankan bukan hanya dari pemerintahan nagari, namun juga terdapat kelompok adat yang memiliki peran penting dalam kegiatan nagari. Nagari Pasia Laweh merupakan nagari yang masih kental nuansa adat lokal. Saat ini kurang lebih terdapat

300 aturan adat, yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adat ini masih belum luntur walaupun sudah banyak pengaruh budaya luar yang masuk ke nagari.

Dalam pembangunan, kaum juga memegang peranan penting. Eksistensi kaum dalam pembangunan di Nagari Pasia Laweh dijabarkan sebagai berikut:

Tahap Assesment

Sebelum kegiatan pembangunan dilakukan, niniak mamak nan saratuih dikato akan bermusyawarah terlebih dahulu menyampaikan aspirasi masing-masing kaum. Kegiatan ini dilakukan agar pembangunan sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Para niniak mamak akan menyusun ide-ide, dan kemudian menyampaikan hasil musyawarah kepada anggota kaum. Tujuannya agar anggota kaum mempersiapkan diri untuk kegiatan yang akan dilaksanakan

Tahap Alternatif Program

Usulan yang telah disusun niniak mamak selanjutnya disampaikan pada forum musyawarah nagari untuk dipilih program yang paling penting dilaksanakan dalam satu tahun tersebut. Kegiatan ini difasilitasi oleh pemerintah nagari.

Tahap Pelaksanaan Program

Pada tahapan ini, kaum memegang peranan penting. Kegiatan yang direncanakan tersebut akan dilaksanakan oleh kaum. Setiap kegiatan pembangunan dilakukan dengan cara gotong royong. Selain kegiatan pembangunan yang direncanakan pemerintah nagari, beberapa kaum juga memiliki rencana kegiatan pembangunan tersendiri. Misalnya pembuatan mushalla, yang dananya dihibahkan oleh satu kaum. Selain itu, kegiatan-kegiatan seperti sekolah hukum adat nagari juga dikelola oleh kaum. Hal ini dimaksudkan agar para pemuda-pemudi yang ada di nagari tidak meninggalkan kearifan lokal yang telah mampu membangun nagari selama ini.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan juga dengan mengumpulkan niniak mamak. Kegiatan ini dilakukan guna melihat kesuksesan program yang telah dijalankan. Pemerintah nagari akan menyampaikan laporan kegiatan pembangunan pada musyawarah nagari. Selanjutnya kaum akan menilai dan mengevaluasi kegiatan

tersebut, apakah benar-benar berguna untuk kemajuan nagari.

Kaum yang ada di Nagari Pasia Laweh tergolong masih eksis sampai saat ini. Terbukti dengan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan selalu melibatkan kaum. Motto sahino samalu membuat semua kaum mau terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan. Hal ini dikarenakan, ketika terdapat salah satu anggota kaum yang tidak mau berpartisipasi, maka niniak mamak kaum tersebut akan merasa malu dengan kaum-kaum lain, dan merasa seperti 'tidak dianggap ada' di Nagari, serta tidak dihargai keberadaannya.

PENUTUP

Kaum merupakan salah satu bentuk kearifan lokal di Minangkabau. Kaum bisa menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di Nagari. Pemanfaatan kaum dalam kegiatan pambangunan juga dilakukan di Nagari Pasia Laweh. Dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa eksistensi kaum dalam pembangunan di Nagari Pasia Laweh masih tinggi, sehingga setiap kegiatan pambangunan yang dilakukan selalu melibatkan kaum. Kaum merupakan unsur paling penting dalam pembangunan di Nagari Pasia Laweh, dan setiap tahapan pambangunan dilaksanakan oleh kaum. Motto sahino samalu membuat semua kaum mau terlibat aktif dalam kegiatan pambangunan, dalam rangka memajukan nagari dan memenuhi kebutuhan kaum.

DAFTAR PUSTAKA

- Addiarrahman, A. (2019). Kearifan Lokal dan Aktifitas Filantropi Perantau Sulit Air Sepakat (SAS) dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1), 177–200. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.177-200>
- Adisasmita. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Astra, I. G. (2004). *Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Memperkokoh Jati Diri Bangsa di Era Global*. Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press.

- Bagus Brata, I. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*, 05(01).
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Murray, M. R., & Greer, J. V. (1999). The changing governance of rural development: State-community interaction in Northern Ireland. *Policy Studies*, 20(1), 37–50. <https://doi.org/10.1080/01442879908423765>
- Nugraha, aji S. (2020). Kearifan Lokal Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. *Sosietas*, 10(1), 745–753. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v10i1.26063>
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? In *Public Management Review* (Vol. 8, Issue 3, pp. 377–387). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Putri, A. A. (2019). Partisipasi Perantau; Basamo Mambangun Nagari Di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 42–54. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.1.42-54.2019>
- Samiyono, D. (2018). Membangun Harmoni Sosial: Kajian Sosiologi Agama tentang Kearifan Lokal sebagai Modal Dasar Harmoni Sosial. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 1(2), 195. <https://doi.org/10.21580/jsw.2017.1.2.1994>
- Suryono. (2001). *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press.
- Syamsurizaldi, S., Putri, A. A., & Sari, M. V. (2020). Raso Banagari : Ekspresi Sosial Perantau terhadap Pembangunan Kampung Halaman. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.5171>